



KEBIJAKAN SMART CITY DI TINGKAT GLOBAL, NASIONAL DAN LOKAL

KEBIJAKAN SMART CITY

- kebijakan smart city adalah serangkaian regulasi, strategi, dan instrumen kebijakan publik yang dirancang pemerintah untuk:
 1. Mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem perkotaan
 2. Meningkatkan efisiensi layanan publik berbasis data
 3. Mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif

KEBIJAKAN SMART CITY DI TINGKAT GLOBAL

- Kebijakan **smart city** dalam konteks global merujuk pada strategi dan kerangka kebijakan yang diterapkan oleh berbagai negara dan kota di dunia untuk memanfaatkan teknologi digital, data, dan inovasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi layanan publik, serta keberlanjutan lingkungan.
- Dalam kerangka global, kebijakan ini selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) terutama Goal 9 (infrastruktur & inovasi) dan Goal 11 (kota berkelanjutan), yang dipromosikan oleh United Nations.

INTRUMEN KEBIJAKAN SMART CITY DI TINGKAT GLOBAL

Dalam praktik global, kebijakan smart city tidak hanya berupa regulasi, tetapi juga menggunakan berbagai instrumen:

a. Instrumen Regulatif

- Undang-undang perlindungan data pribadi
- Kebijakan interoperabilitas sistem digital (saling terhubung/terintegrasi antar organisasi)
- Standarisasi teknologi (misalnya IoT governance)

b. Instrumen Ekonomi

- Subsidi inovasi teknologi
- Skema Public-Private Partnership (PPP)
- Insentif pajak bagi perusahaan teknologi

c. Instrumen Informasional

- Open data platform
- Dashboard kota pintar
- Sistem informasi publik berbasis digital

Model Tata Kelola (Governance Model)

Kebijakan smart city global umumnya mengadopsi model berikut:

a. Centralized Model

- Dikendalikan pemerintah pusat
- Contoh: Singapore
- Keunggulan: koordinasi kuat, implementasi cepat

b. Collaborative Model

- Kolaborasi multi-aktor (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat)
- Contoh: Amsterdam
- Keunggulan: inovasi tinggi, partisipatif

c. Platform-based Governance

- Kota sebagai platform data (urban data platform)
- Integrasi berbagai layanan dalam satu sistem digital

STUDI KASUS KEBIJAKAN “SMART CITY

1. Singapore – Smart Nation Policy

- Kebijakan nasional berbasis data terintegrasi
- Sensor di seluruh kota (smart surveillance, transport)
- Digital ID untuk layanan publik

2. Barcelona – IoT-driven Policy

- Sensor untuk parkir, lampu jalan, dan limbah
- Efisiensi anggaran kota melalui data real-time

3. Amsterdam – Co-creation Policy

- Kolaborasi warga dalam inovasi kota

ISU STRATEGIS GLOBAL

- Kebijakan smart city global saat ini berfokus pada isu-isu berikut:
- **a. Data Governance**
- Kepemilikan data (data ownership)
- Privasi dan keamanan (cybersecurity)
- **b. Digital Divide**
- Ketimpangan akses teknologi antar wilayah
- Tantangan utama di negara berkembang
- **c. Ethical Smart City**
- Penggunaan AI yang etis
- Pengawasan berbasis teknologi vs hak privasi

Klasifikasi kota berdasarkan tahap pertumbuhan

- Kota Warisan (*Legacy City*)
Memiliki populasi yang stabil serta penataan infrastruktur yang baik. Contohnya : London, NYC, Tokyo
- Kota Baru (*New City*)
Kota yang sedang mengalami perkembangan dengan perencanaan yang signifikan. Contohnya : Dubai, Malaysia
- Kota Bertransisi (*Transitioning City*)
Tingkat pertumbuhan populasi yang signifikan melalui urbanisasi sehingga menimbulkan tantangan dalam hal infrastruktur. Contohnya : Bangkok, Indonesia (Jakarta)

CONTOH KEBIJAKAN “SMART CITY” DI TINGKAT NASIONAL

Gerakan Menuju 100 Smart City

- Program ini diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kominfo bersama lintas kementerian sejak 2017.
Fokus utamanya:
- Membimbing pemerintah daerah dalam menyusun **masterplan Smart City**
- Mendorong pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik
- Mengembangkan 6 dimensi Smart City: smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment

“KEBIJAKAN SMART CITY DITINGKAT NASIONAL

Landasan Hukum

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Presiden tentang Satu Data
- Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City di Indonesia.

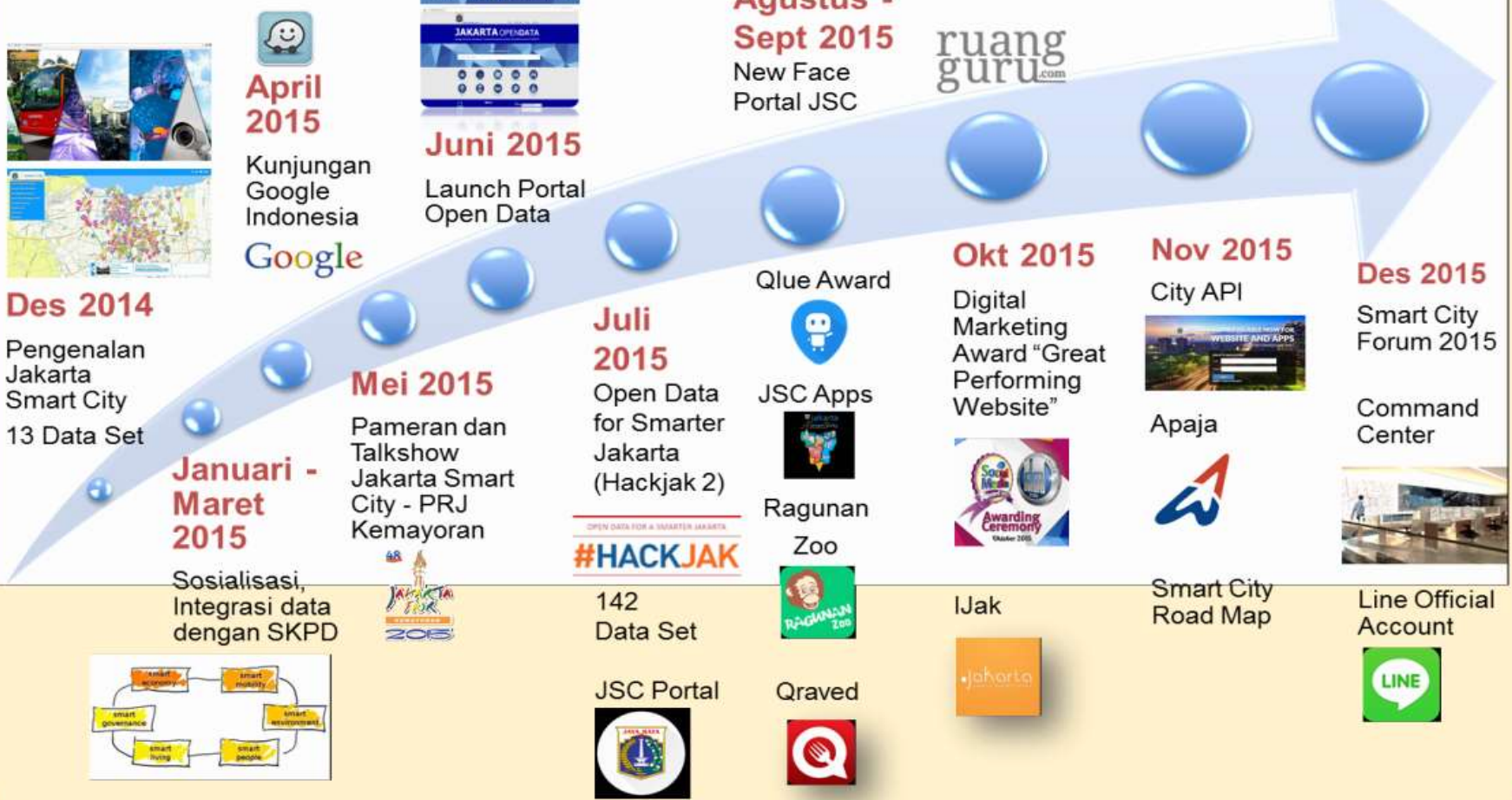
KEBIJAKAN “SMART CITY” DI TINGKAT LOKAL

Kebijakan *smart city* di tingkat lokal (pemerintah daerah/kota) pada dasarnya berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi kota pintar di Indonesia

■ Smart city Jakarta

- 6 pilar konsep smart city yang diterapkan : *Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment*
- Portal Jakarta Smart City (JSC) : smartcity.jakarta.go.id
- *Smart City Longue* menggunakan aplikasi *Qlue, Jakarta One Card, City Surveillance System, Dump truck Tracker* (GPS dan manajemen rute), *Heavy Equipment tracker* (GPS serta monitoring perawatan dan penggantian suku cadang), *Smart Street Lighting System / Philips city touch* membuat setiap titik lampu terkoneksi dan data kinerjanya bisa langsung dikirim melalui jaringan selular ke pengelola atau Dinas Perindustrian dan Energi (DPE). Misalnya pada malam hari, saat jumlah kendaraan berkurang, DPE dapat meredupkan sinar lampu hingga 50%, ini membuat penghematan energi lebih jauh.



Menuju Jakarta Smart City



Implementasi kota pintar di Indonesia

■ Smart city Makassar

- *Makassar Smart Card, Makassar Home Care, Makassar Student Smart Card* mampu membawa makassar masuk sebagai salah satu kota di Indonesia pada IBM (International Business Machine) smart city challenges 2018 oleh jaringan global PBB
- 3 indikator penilaian keberhasilan :
 - Komitmen pembangunan Makassar ke arah smart city
 - Komitmen kepemimpinan daerahnya
 - Dinamika masyarakat yang menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik

Implementasi kota pintar di Indonesia

■ Smart city Manado

- Ada 9 aplikasi antara lain
 - Sistem Gabungan Informasi Perangkat (Si Gita)
 - Sistem Pemantauan Masyarakat (Si Tasya)
 - *Elektronik Goverment Letter* (e-Gol)
 - Pantau Harga Pangan (Tau-Pang)
 - Ramalan Iklim Cuaca Cerdas (RICCA)
 - Radio Komunikasi Gagak
 - Qlue Manado
 - Lapor Manado dan Kanal Resmi Pemkot Manado.